

Sejarah dan Budaya:
Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index

Research Article

Respon sosial terhadap bencana alam di Surakarta dan Yogyakarta, 1951–1954

Social responses to natural disasters in Surakarta and Yogyakarta, 1951–1954

Yoga Difa Perdana[a*], Awalia Rahma[b], Imas Emalia[C]
yoga_difaperdana24@mhs.uinjkt.ac.id, awalia.rahma@uinjkt.ac.id, imas.emalia@uinjkt.ac.id

[a] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
[b] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
[c] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

*Corresponding email: yoga.difaperdana04@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: October 29, 2025
Revised: November 15, 2025
Accepted: December 22, 2025
Published: December 31, 2025

Permalink/DOI

10.17977/um020v19i22025p179-191

Copyright © 2025.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Perdana, Y.D., Rahma, A., & Emalia, I. (2025). Respon sosial terhadap bencana alam di Surakarta dan Yogyakarta, 1951–1954. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(2), 179-191. http://dx.doi.org/10.17977/um020v19i22025p179-191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

This study examines natural disasters in Central Java, focusing on the floods in Surakarta in 1951–1953 and the eruption of Mount Merapi in 1954. This study aims to understand the social response of the community, the forms of government assistance, and the process of social recovery after the disaster. The method used is the historical method through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography by utilizing contemporary newspapers, official reports, and secondary sources. The approach used is sociology. The analysis is reinforced by the theory of social vulnerability, which emphasizes that the impact of a disaster is determined by the social conditions prior to the disaster. The results of the study show that floods and eruptions are not only triggered by natural factors, but also by environmental damage, spatial inequality, and limited state capacity. On the other hand, mutual cooperation, social solidarity, and state response through material and symbolic assistance are important parts of the recovery of the affected communities.

KEYWORDS

Natural Disasters, Social Vulnerability, Social Response, Surakarta, Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bencana alam di Jawa Tengah dengan fokus pada banjir di Surakarta tahun 1951–1953 dan letusan Gunung Merapi tahun 1954. Penelitian ini bertujuan untuk memahami respons sosial masyarakat, bentuk bantuan pemerintah, serta proses pemulihan sosial pascabencana. Metode yang digunakan adalah metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan surat kabar sezaman, laporan resmi, serta sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi. Analisis diperkuat dengan teori kerentanan sosial yang menekankan bahwa dampak bencana ditentukan oleh kondisi sosial sebelum bencana terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir dan erupsi tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh kerusakan lingkungan, ketimpangan tata ruang, dan keterbatasan kapasitas negara. Di sisi lain, praktik gotong royong, solidaritas sosial, dan respons negara melalui bantuan material maupun simbolik menjadi bagian penting dalam pemulihan masyarakat terdampak.

KATA-KATA KUNCI

Bencana Alam, Kerentanan Sosial, Respons Sosial Surakarta, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Bencana alam adalah peristiwa besar yang datang secara tiba-tiba dan mengganggu kehidupan normal suatu masyarakat. Peristiwa ini bisa menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan, hilangnya harta benda, terputusnya layanan penting, atau bahkan lenyapnya mata pencaharian, hingga masyarakat tidak mampu menanganinya sendiri tanpa bantuan. Istilah bencana juga dipakai untuk menggambarkan situasi parah ketika kehidupan manusia atau lingkungan rusak sehingga perlu tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga alam. Secara umum, bencana dibedakan berdasarkan penyebab dan kecepatan kejadiannya, seperti bencana alam yang datang mendadak, bencana yang berkembang perlahan, bencana akibat teknologi, dan bencana yang disebabkan oleh manusia (A.W. Coburn, 1994, p. 64).

Menanggulangi bencana memerlukan kerja sama semua pihak, sama halnya seperti upaya manusia melawan penyakit. Proses menanggulangi bencana menuntut keterlibatan investasi baik dari sektor pemerintah maupun swasta, disertai perubahan sikap sosial dan peningkatan kesadaran individu dalam bertindak. Sebagaimana Revolusi Sanitasi memunculkan budaya keselamatan di bidang kesehatan masyarakat, upaya mitigasi bencana juga harus menumbuhkan budaya serupa demi keselamatan publik. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur dan menciptakan lingkungan yang lebih aman melalui investasi publik, tetapi keberhasilan perlindungan tetap bergantung pada partisipasi individu dalam menjaga keselamatan dirinya (A.W. Coburn, 1994, p. 14).

Penelitian mengenai bencana alam banjir dan gunung meletus di Jawa pada tahun 1950-an telah dilakukan beberapa peneliti, di antaranya oleh Nur Isnaini Firdhausa Kholidah. Ia menulis tentang banjir yang terjadi di Surakarta pada tahun 1966. Artikel yang ditulis oleh Kholidah berjudul *"Banjir dan Bantuan di Surakarta: Filantropi dalam Banjir Solo Tahun 1966"*, membahas praktik filantropi masyarakat Indonesia sebagai respons terhadap banjir besar di Surakarta tahun 1966. Penelitian ini turut menyoroti bagaimana rasa kemanusiaan dan empati muncul di tengah situasi politik yang tidak stabil pasca 1965. Pemerintah membentuk *Pelaksana Komando Bentjana Alam (PEKOBENTJAL)* untuk menyalurkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan dan mahasiswa. Firdhausa menegaskan bahwa solidaritas sosial lintas agama dan golongan menjadi kekuatan utama dalam memulihkan kondisi pascabencana. Praktik gotong royong dan kepedulian sosial tersebut mencerminkan nilai-nilai filantropi yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia (Kholidah, 2022).

Penelitian lainnya mengenai bencana alam di Jawa Tengah dilakukan oleh Muhammad Diaz Nur Kholik dan Kawan-kawan (dkk). Artikel yang berjudul *"Dampak Sosial dari Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 pada Masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta"* membahas secara komprehensif efek sosial dari bencana erupsi Merapi terhadap kehidupan masyarakat sekitar lereng gunung, khususnya di Sleman. Penulis melakukan kajian terhadap laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengoordinasikan penanggulangan bencana, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah lembaga pemerintah yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik dasar di Indonesia. Kajian Kholik dkk menunjukkan bahwa letusan 2010 menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, serta trauma psikologis berkepanjangan bagi warga. Perubahan sosial ekonomi juga tampak melalui pergeseran mata pencaharian, misalnya dari petani menjadi penambang pasir. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran mitigasi bencana melalui kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko erupsi di masa mendatang (Diaz et al., 2025).

Selain itu, Adam Bobbette dalam karyanya yang berjudul *The Pulse of the Earth: Political Geology in Java* menunjukkan bahwa pengetahuan geologi modern, khususnya vulkanologi dan teori tektonik lempeng, terbentuk melalui interaksi historis antara sains Barat, kekuasaan kolonial, dan kosmologi lokal Jawa. Dengan menempatkan Jawa sebagai pusat produksi pengetahuan geologi global, Bobbette mendekonstruksi narasi Eropa-sentris tentang sejarah sains dan menegaskan bahwa praktik ilmiah kolonial tidak sepenuhnya menggantikan spiritual geografis Jawa, melainkan berinteraksi, bertransformasi, dan saling menegaskan. Buku ini menyoroti bagaimana geologi berfungsi sebagai alat *geopower* dalam konteks kolonial dan pascakolonial, sekaligus memperlihatkan percampuran antara epistemologi ilmiah dan mistik dalam memahami relasi manusia, gunung berapi, dan bumi sebagai entitas politis dan ontologis (Bobbette, 2023).

Penelitian lainnya yang mengkaji tentang letusan Gunung Merapi dilakukan oleh Muryani dkk. Penelitian ini menggunakan metodologi *New Volcanic Risk Ranking (VRR)* untuk menganalisis tingkat bahaya, paparan, kerentanan, ketangguhan, dan risiko erupsi Gunung Merapi di lereng utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman erupsi di wilayah tersebut didominasi oleh kategori tinggi, terutama di Desa Tlogolele dan Klakah, yang memiliki tingkat paparan dan aktivitas ekonomi pertanian yang besar. Meskipun kerentanan sosial-ekonomi berada pada tingkat sedang, kemampuan ketangguhan masyarakat, termasuk kesiapsiagaan, mitigasi berbasis peta bahaya, dan sistem peringatan dini, menunjukkan hasil yang relatif baik. Hasil penelitian menegaskan bahwa analisis risiko vulkanik harus memperhitungkan interaksi antara bahaya alam, dinamika demografis, dan kapasitas sosial, serta pentingnya peningkatan mitigasi seperti perencanaan ruang berbasis bahaya dan penguatan sistem peringatan dini untuk menurunkan risiko erupsi di kawasan rawan (Muryani et al, 2024).

Bertolak dari penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai bencana alam sebagai isu sosial di Jawa Tengah pada periode awal 1950-an. Fokus kajian diarahkan pada bencana banjir di Surakarta pada 1951–1953 serta letusan Gunung Merapi pada 1954 yang berdampak pada beberapa wilayah di Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta. Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu (1) bagaimana respon sosial masyarakat terhadap bencana di Surakarta dan Yogyakarta pada 1951–1956, (2) bentuk bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah, dan (3) bagaimana proses pemulihan sosial masyarakat setelah bencana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alamiah, tetapi sebagai persoalan sosial yang memperlihatkan dinamika gotong royong, solidaritas, dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam merespons dan memulihkan diri dari krisis lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dariempat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder berupa surat kabar sezaman, laporan resmi pemerintah buku, artikel jurnal, dan *website*. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi untuk menelusuri hubungan antara individu, kelompok, dan institusi, serta menyoroti peran stratifikasi sosial, organisasi, dan dinamika sosial dalam membentuk respons masyarakat dan negara terhadap bencana. Melalui pendekatan ini, banjir di Surakarta dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dipahami tidak hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai krisis sosial yang dampaknya berbeda-beda antar kelompok masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori kerentanan sosial (*social vulnerability*) sebagaimana dikemukakan oleh Ben Wisner, Piers Blaikie, Terry Cannon, dan Ian Davis. Teori ini memandang bencana bukan semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara ancaman alam dan kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Kerentanan didefinisikan sebagai karakteristik individu atau kelompok, beserta situasi sosialnya, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mengantisipasi, menghadapi, bertahan, serta pulih dari dampak bahaya alam. Kerentanan tersebut terbentuk oleh berbagai faktor sosial, seperti kelas sosial, mata pencaharian, akses terhadap sumber daya, jaringan sosial, serta posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat (Wisner et al., 2014, p. 11). Dalam penelitian ini, dampak bencana tidak dialami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok tertentu cenderung lebih rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan penderitaan akibat keterbatasan kapasitas sosial, ekonomi, dan institusional yang mereka miliki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banjir di Surakarta (1951-1953)

Kota Surakarta, kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah berkembang dan dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata.(Perda Kota Surakarta, 2010, p. 1) Secara regional, kota ini didukung oleh enam wilayah hinterland yang dikenal sebagai kawasan Soloraya, yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.(Perda Kota Surakarta, 2010, p. 3) Dari segi topografi, Kota Surakarta memiliki kondisi wilayah yang relatif datar dengan ketinggian sekitar ±92 meter di atas permukaan laut. Selain itu, wilayah Kota Surakarta dilintasi oleh beberapa sungai, antara lain Sungai Pepe, Sungai Jenes, Sungai Premulung, dan Sungai Anyar (Perda Kota Surakarta, 2010, p. 4).

Kondisi geografis dan topografis Kota Surakarta tersebut tidak hanya membentuk karakter ruang kota, tetapi juga menyimpan kerentanan ekologis yang menjadi latar penting bagi terjadinya bencana alam. Keberadaan sejumlah sungai yang melintasi wilayah kota, dikombinasikan dengan topografi yang relatif datar, menjadikan Surakarta dan kawasan sekitarnya rawan terhadap luapan air, terutama pada musim hujan. Kerentanan inilah yang pada awal dekade 1950-an berkembang menjadi persoalan serius ketika banjir tidak lagi sekadar dipahami sebagai fenomena alam, melainkan sebagai masalah sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Kerentanan tersebut semakin nyata pada awal dekade 1950-an, ketika banjir di Surakarta tidak lagi dipahami semata-mata sebagai fenomena hidrologis musiman, melainkan berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kombinasi antara topografi datar, kemerosotan kualitas lingkungan di wilayah hulu, serta struktur permukiman perkotaan yang timpang menjadikan banjir sebagai pengalaman berulang yang terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, banjir menjadi krisis kemanusiaan perkotaan yang menyingkap keterbatasan kapasitas perlindungan negara pada masa awal kemerdekaan.

Laporan surat kabar sepanjang tahun 1951 hingga tahun 1953 menunjukkan bahwa banjir telah menjadi bagian dari pengalaman hidup masyarakat Surakarta. Degradasi lingkungan yang meluas sejak masa pendudukan Jepang, meningkatnya erosi tanah di wilayah hulu, serta struktur permukiman yang tidak merata secara sosial-ekonomi memperparah dampak banjir. Akibatnya, setiap musim hujan tidak hanya

membawa kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama petani kecil dan buruh perkotaan.

Pada tahun 1951, tanda-tanda awal krisis yang lebih besar tampak jelas ketika surat kabar *Nieuwe Courant* edisi 25 Januari 1951 melaporkan bahwa permukaan air Bengawan Solo telah mencapai titik kritis dan mengancam kawasan kota. Pemerintah daerah merespons situasi tersebut dengan membentuk komite bantuan darurat (tidak disebutkan nama komitenya), tetapi upaya tersebut lebih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan yang bersifat struktural. Pemberitaan surat kabar pada masa ini menunjukkan bahwa banjir telah menjadi fenomena yang berulang setiap tahun dan semakin dipahami oleh masyarakat sebagai perwujudan kerentanan ekologis yang menimpa terutama kelompok-kelompok sosial di kelas bawah. Dalam konteks ini, banjir memperlihatkan ketidaksetaraan, di mana kawasan elite cenderung lebih terlindungi, sementara pemukiman padat penduduk di tepian sungai menjadi titik paling rawan, mencerminkan perbedaan kedudukan tata ruang yang terbentuk sejak era kolonial (Nieuwe Courant, 1951, p. 2).

Meskipun banjir tahun 1951 tidak tercatat sebagai banjir besar seperti yang terjadi pada tahun 1966 di Kota Surakarta, banjir di Kota Surakarta tahun 1951 menjadi fase penting dalam perkembangan kebijakan penanganan bencana di Surakarta. Pemerintah kota mulai melakukan restrukturisasi ruang kota, termasuk relokasi permukiman liar di bantaran Bengawan Solo seperti di Sangkrah, Semanggi, Joyotakan, dan Manahan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir dan mendukung agenda pengembangan kota. Kebijakan ini mencerminkan bentuk pencegahan sebelum terjadinya bencana yang bertujuan mengendalikan kerentanan jangka panjang, meskipun sering kali menempatkan beban adaptasi pada masyarakat miskin perkotaan.

Memasuki tahun 1953, pemerintah pusat mulai menggeser pandangannya dari penjelasan berbasis cuaca menuju analisis yang menekankan faktor sosial-lingkungan. Wawancara dengan Mohammad Sardjan (Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap, 1952-1956) yang dimuat dalam surat kabar *Algemeen Handelsblad* edisi 16 Februari 1953 menegaskan bahwa kerusakan hutan yang terjadi bukan proses alamiah, melainkan hasil dari interaksi politik, ekonomi, dan militer sejak 1942, yaitu sejak kependudukan Jepang di Indonesia. Penebangan pohon besar-besaran pada masa pendudukan Jepang, krisis pangan, dan kebutuhan logistik selama perang kemerdekaan menyebabkan sekitar 500.000 hektare hutan di Jawa Tengah rusak berat. Kondisi ini menciptakan rantai kerentanan baru bagi petani kecil yang menggantungkan hidup pada lahan-lahan yang kian menurun produktivitasnya. Atas terjadinya peristiwa tersebut, pemerintah pusat mencoba merespons melalui rencana sepuluh tahun rehabilitasi tanah dan reboisasi, termasuk peningkatan anggaran menjadi Rp 8 juta pada akhir 1952. Meski demikian, respons ini belum mampu mengimbangi cepatnya laju kerusakan yang telah terjadi (Algemeen Handelsblad, 1953, p. 3).

Krisis memuncak pada Februari 1953 ketika banjir besar kembali melanda Surakarta dan sekitarnya. Surat kabar *Indische Courant voor Nederland* edisi 25 Februari 1953 menegaskan bahwa bencana tersebut bukan kejutan, melainkan konsekuensi langsung dari degradasi hulu sungai yang terus berlangsung tanpa penanganan serius. Mohammad Sardjan menjelaskan bahwa wilayah-wilayah seperti Wonogiri, Gunung Kidul, dan Trenggalek mengalami kerusakan paling parah, di mana Wonogiri kehilangan sekitar 60.000 hektare hutan dan hanya 1.200 hektare yang berhasil direboisasi. Hilangnya lapisan tanah subur menyebabkan sungai membawa hingga 200 kilogram sedimen per meter kubik air, memperburuk pendangkalan dan meningkatkan risiko

banjir. Dampak sosialnya begitu nyata, contohnya adalah hasil pertanian merosot, ancaman kelaparan meningkat, dan masyarakat desa di daerah hulu semakin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural (Indische Courant voor Nederland, 1953, p. 1).

Meluapnya Sungai Pepe pada 9 Februari 1953 yang melintasi pusat Kota Surakarta meluap hanya setelah hujan deras selama tiga jam. Pintu air yang menghubungkan Sungai Pepe dengan Bengawan Solo harus ditutup karena permukaan air sungai utama justru lebih tinggi, sehingga membuka pintu air dapat mengakibatkan aliran balik yang membanjiri pusat kota. Peristiwa ini kembali memperlihatkan ketimpangan tata ruang kota yaitu daerah yang dihuni kelas pekerja menjadi yang paling terdampak, sementara kawasan pemerintahan dan ekonomi inti relatif lebih terlindungi. Situasi tersebut mendorong pejabat daerah, salah satunya adalah Budiono (Gubernur Jawa Tengah periode 1949-1954), untuk meninjau langsung lokasi-lokasi terdampak, menunjukkan bagaimana banjir telah menjadi isu publik yang menuntut perhatian politik (Indische Courant voor Nederland, 1953, p. 1).

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana besar bagi Jawa Tengah pada pertengahan tahun 1953. Surat kabar *De Locomotief* edisi 21 Mei 1953 mencatat bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti bendungan, pengerukan sungai, dan saluran pembuangan air, sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir. Dana besar yang disalurkan oleh pemerintah pusat terbagi untuk beberapa pihak. Dana sejumlah 21,5 juta rupiah untuk provinsi, 4,5 juta rupiah untuk kabupaten dan kota besar, serta 3,5 juta rupiah untuk pembangunan mendesak. Selain itu, sejumlah proyek diarahkan secara khusus untuk mitigasi banjir, seperti pembangunan Tjatjaban Dam senilai 7 juta rupiah, pengerukan Kali Peniali, pembangunan Widodaren Dam di Pati, rehabilitasi bendungan di wilayah Surakarta, serta pembangunan *afwateringskanaal*. Kebijakan ini menunjukkan upaya negara membangun kembali legitimasi sosialnya melalui proyek-proyek penanggulangan bencana dalam bentuk infrastruktur, setelah sebelumnya gagal memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat (De Locomotief, 1953a, p. 2).

Rangkaian peristiwa banjir yang terjadi di Kota Surakarta pada periode 1951–1953 menunjukkan bahwa banjir tidak semata-mata merupakan fenomena alam, melainkan fenomena sosial yang terbentuk melalui interaksi antara kerusakan lingkungan, ketimpangan tata ruang, dan keterbatasan kapasitas negara pada masa awal pascakemerdekaan. Dalam konteks ini, praktik *disaster relief* tidak hanya berfungsi sebagai upaya kemanusiaan, tetapi juga menjadi arena negosiasi antara negara, elite lokal, dan masyarakat dalam merespons krisis lingkungan yang berulang.

Fenomena banjir Surakarta pada periode 1951–1953 memang berbeda dengan banjir besar tahun 1966 yang kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, penelitian ini menyoroti aspek-aspek yang belum banyak mendapat perhatian dalam kajian sebelumnya, khususnya terkait pola tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana. Mengingat periode 1951–1953 merupakan fase awal, yakni sekitar delapan tahun setelah Indonesia merdeka, keterbatasan alat, anggaran, dan kapasitas kelembagaan negara menjadi faktor penting yang memengaruhi bentuk dan efektivitas penanganan banjir di Kota Surakarta.

Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta (1954)

Berbeda dengan Surakarta, secara topografis (studi mengenai bentuk dan unsur permukaan tanah), Daerah Istimewa Yogyakarta jarang terkena musibah banjir. Hal ini dikarenakan tanah yang ada di wilayah Yogyakarta terdiri dari campuran pasir. Sebagian besar kebutuhan air penduduk diperoleh melalui dua cara, yaitu dari pasokan dinas perusahaan air minum dan dari sumber-sumber air yang dikelola sendiri oleh masyarakat, terutama sumur. Sumur-sumur tersebut umumnya memiliki kedalaman antara 10 hingga 15 m dari permukaan tanah. Kota Yogyakarta menerima curah hujan tahunan sekitar 2.000 hingga 2.500 mm, dengan distribusi antara musim kemarau dan musim hujan masing-masing sekitar 33,3% dan 60%. Meskipun curah hujan relatif tinggi, kondisi tanah kota yang berpasir menyebabkan air hujan cepat meresap ke dalam tanah.(Harnako, 1993, p. 16)

Meskipun terhindar dari bencana banjir, Yogyakarta sangat rentan terhadap bencana lain, yaitu letusan gunung berapi. Sepanjang abad ke-20, Gunung Merapi berada di wilayah administratif Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, yang mencakup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah,((BPBD), 2022) tercatat mengalami erupsi berulang, termasuk letusan besar pada tahun 1931. Beberapa tahun kemudian, erupsi Merapi kembali terjadi pada tahun 1954. Letusan tahun 1954 tidak hanya memuntahkan abu dan material vulkanik, tetapi juga memicu aliran lahar yang mengikuti jalur sungai-sungai di lereng Merapi. Dampaknya terasa langsung pada permukiman, lahan pertanian, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.(Merapi, 2010)

Pada tahun 1953, satu tahun sebelum meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1954, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah bekerjasama dalam memantau aktivitas Gunung Merapi. Menurut surat kabar *De Locomotief* edisi 9 Maret 1953, para ahli vulkanologi telah memprediksi meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berpotensi memicu terjadinya erupsi. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengamatan Gunung Merapi lewat udara, pengamatan tersebut dilakukan dengan penerbangan pesawat Catalina milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Dalam melakukan survei tersebut, pemerintah pusat melibatkan Kepala Dinas Vulkanologi, Dr. G. A. de Neve, serta turut melibatkan pemerintah daerah seperti Bupati Magelang, Sleman, Boyolali. Pengawasan tidak berhenti pada satu kali misi. Rombongan lain yang terdiri dari Paku Alam, P. Honggowongso, Bupati Klaten, Wali Kota Magelang, dan sejumlah pejabat daerah kembali melakukan penerbangan pengamatan dengan pesawat yang sama.(Locomotief, 1953b, p. 2)

Survei udara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bukan hanya sekedar pemantauan biasa terhadap aktivitas Gunung Merapi, tetapi juga untuk menilai kondisi kawah Merapi yang rawan runtuh. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kawah gunung tertutup oleh *lava-prop* (bongkahan lava), sebuah kondisi yang berbahaya karena dapat menimbulkan ledakan, runtuhnya dinding kawah, atau guguran awan panas.(Locomotief, 1953b, p. 2) Serangkaian inspeksi udara ini menjadi bukti bahwa pihak berwenang telah mengambil langkah proaktif dalam merespons ancaman erupsi. Pemerintah berupaya memahami dinamika aktivitas Merapi sekaligus menyiapkan tindakan mitigasi sebelum bencana meletusnya Gunung Merapi benar-benar terjadi.(Locomotief, 1953b, p. 2)

Prediksi yang disampaikan para ahli vulkanologi pada tahun 1953 seperti yang termuat dalam surat kabar *De Locomotief* edisi 9 Maret 1953 terbukti akurat ketika Merapi memasuki fase erupsi baru pada 1954. Pada tahun 1954 hingga tahun 1956,

aktivitas vulkanik meningkat secara signifikan dan mengarah pada dampak yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan semula oleh para ahli vulkanologi. Catatan vulkanologi dan dokumentasi lapangan dari periode tersebut menunjukkan bahwa letusan-letusan ini menimbulkan kerusakan serius pada kawasan pemukiman di lereng utara serta menimbulkan korban jiwa dan perubahan aliran lava.(Chatarina Muryani et al, 2024, pp. 2–3) Pemaparan berikut menggambarkan secara lebih rinci dampak dari erupsi besar Merapi pada periode tersebut.

Menurut surat kabar Suara Rakjat 19 Januari 1954, pada pukul 11.40 WIB Gunung Merapi mulai mengeluarkan lahar dan hujan abu. Lahar dan hujan abu tersebut tercatat mencapai Desa Tlogolele, yaitu perbatasan antara Boyolali hingga Magelang. Kemudian, pada pukul 13.30 WIB puncak Gunung Merapi mulai tertutup oleh abu dan hujan. Sementara itu, masyarakat yang berada di Boyolali mulai mengungsi ke kawasan Gunung Merbabu.(Anonim, 1954a) Suara Rakjat edisi 20 Januari 1954 melaporkan bahwa akibat semburan lahar dan hujan abu yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi tersebut, terdapat 23 orang meninggal dan 66 orang mengalami luka bakar.(Anonim, 1954b)

Letusan besar Gunung Merapi pada tahun 1954 meninggalkan jejak historis dan psikologis yang kuat bagi masyarakat di sekitarnya. Kesaksian salah satu warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi adalah Waginem (warga Dusun Pencar, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang tinggal di sekitar lereng Merapi) yang berusia 82 tahun. Dalam laporan *Kompas* edisi 23 November 2020, Waginem merekam kembali pengalaman pribadinya tentang meletusnya Gunung Merapi meletus pada 18 Januari 1954. Waginem menjelaskan bahwa pada waktu terjadinya letusan tersebut, usianya baru 16 tahun. Bersama tiga teman sebayanya, Waginem duduk menghadap ke arah puncak Merapi, gunung yang oleh masyarakat setempat kerap disebut sebagai "Eyang Merapi".(Mewangi, 2020)

Menurut kesaksian Waginem, pada pagi hari ketika ia sedang mencari rumput di sebuah tanah lapang dekat rumah untuk pakan ternaknya, ia mulai menyadari adanya perubahan kondisi alam yang tidak biasa. Langit perlahan-lahan menggelap dan kemudian berubah menjadi keunguan, diikuti suara gemuruh yang terus-menerus terdengar dari arah puncak Gunung Merapi. Tidak lama berselang, kilat dan petir menyambar, disusul hujan abu yang turun di sekitar permukiman warga. Menyadari bahaya yang mengancam, Waginem segera berlari pulang dan membawa ketiga adiknya keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Peristiwa letusan Gunung Merapi pada tahun 1954 meninggalkan trauma mendalam bagi Waginem. Selain kehilangan rumah serta hewan ternaknya yang mati akibat abu dan awan panas, Waginem juga mengigat peristiwa tersebut sebagai kenangan yang menyedihkan tentang teman-teman sebayanya yang turut menjadi korban dalam bencana tersebut.(Mewangi, 2020)

Dusun Pencar, tempat tinggal Waginem beserta masyarakat lainnya adalah salah satu dusun (desa) yang tidak tersisa akibat letusan Gunung Merapi pada 18 Januari 1954.(Mawarni, 2019) Selain Waginem, kesaksian lain terkait hebatnya erupsi Gunung Merapi pada tahun 1954 juga terekam dalam ingatan Gino, masyarakat Dusun Klakah yang turut terdampak erupsi Gunung Merapi. Menurut Gino, letusan Gunung Merapi tahun 1954 merupakan salah satu peristiwa yang berdampak buruk kepada dirinya dan masyarakat Desa Pencar. Gino yang kini berusia 75 tahun mengingat peristiwa tersebut pada saat dirinya berusia 10 tahun. Gino menjelaskan bahwa meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1954 ditandai dengan munculnya awan. Kemudian, masyarakat mulai berlarian untuk menyelamatkan diri dan mengungsi, bahkan ada yang sampai ke wilayah Magelang, Jawa Tengah.(Mawarni, 2019) Akibat peristiwa meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1954 ini, mengakibatkan hilangnya dua dusun, yaitu Dusun Pencar dan Dusun

Klakah, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Data lain menyebutkan bahwa pada tahun 1954 dan 1956, aliran lava mengarah ke Sungai Apu dan melintasi wilayah Desa Tlogolele, Boyolali, Jawa Tengah.(Chatarina Muryani et al, 2024, p. 3)



Gambar 1. Merapi Volcano Erupts (1954)
(sumber: *www.britishpathe.com*)

Berita tentang meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1954 ini juga terekam dalam salah satu video dokumenter yang termuat dalam *channel YouTube* dan *website* resmi dari British Pathé (perusahaan produksi newsreel dan dokumenter dari 1910 sampai 1970 di Britania Raya). Dalam video dokumenter berdurasi 34 detik tersebut yang diambil dari udara, pemandangan Gunung Merapi terlihat jelas sedang mengalami erupsi.(Pathé, 2014) Sebagaimana termuat dalam *website* resminya, British Pathé menyebut letusan ini dengan judul "*Huge 'killer volcano' eruption in Java leaves many dead and others terror stricken*" yaitu letusan besar gunung berapi mematikan di Jawa menewaskan banyak orang dan membuat yang lain ketakutan.(Pathé, 1954)



Gambar 2. Merapi Volcano Erupts (1954)
(sumber: *www.britishpathe.com*)

Dalam merespons peristiwa menegangkan tersebut, tentara dan polisi segera mengevakuasi ribuan warga yang berada di sekitar Gunung Merapi. Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah menyediakan persediaan makanan pokok serta tempat pengungsian darurat bagi warga yang terkena dampak letusan Gunung Merapi. Dalam video dokumenter tersebut, British Pathé menjelaskan bahwa 25 orang warga meninggal dunia dan lainnya menderita luka-luka.

Peristiwa erupsi Gunung Merapi pada tahun 1954 meninggalkan jejak material vulkanik berupa aliran lava yang sebagian masih dapat diamati hingga tahun 2020. Berdasarkan laporan *Kompas* edisi 23 November 2020, lava yang dikeluarkan saat erupsi tersebut mengalami proses guguran, sehingga sisa-sisa lava Merapi yang membeku dan

menempel pada dinding kawah bagian utara Gunung Merapi mengalami runtuhan. Data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat bahwa guguran lava sisa erupsi 1954 terjadi pada pukul 06.50 WIB. Peristiwa tersebut terekam pada seismogram BPPTKG dengan amplitudo mencapai 75 milimeter dan durasi selama 82 detik (Firdaus, 2020; Kompas, 2020). Gunung Merapi di Jawa Tengah merupakan gunung api bertipe andesitik, yaitu gunung yang menghasilkan lava dengan sifat kental dan mudah membeku. Karakteristik lava andesitik ini menyebabkan terbentuknya sumbatan lava di kawah, yang dalam kondisi tertentu dapat mengalami ketidakstabilan dan runtuh secara tiba-tiba (Subekti, 2021, p. 38).

Selain pemberitaan dari berbagai media cetak, kesaksian para korban letusan Gunung Merapi, serta dokumentasi visual yang merekam suasana erupsi tahun 1954, peristiwa letusan Gunung Merapi juga diabadikan dalam bentuk karya seni lukis dan diterbitkan sebagai prangko. Representasi visual tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa, tetapi juga sebagai medium pembentukan memori kolektif dan sarana komunikasi simbolik negara dalam merespons bencana, yang memperlihatkan dimensi bantuan bencana tidak hanya pada tingkat material, tetapi juga pada ranah simbolik dan kultural.



Gambar 3. Prangko Amal
(sumber: *www.posindonesia.co.id*)



Gambar 4. Prangko Amal
(sumber: *www.posindonesia.co.id*)

Sebagai bagian dari upaya penggalangan dana kemanusiaan, pada tahun 1953 pemerintah menerbitkan prangko amal yang hasil penjualannya dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di Aceh. Prangko tersebut menggunakan seri prangko kantor pusat PTT yang diberi cetak tindih bertuliskan

"Bencana Alam". Pola serupa kembali diterapkan ketika Gunung Merapi di Jawa Tengah mengalami erupsi pada tahun 1954, dengan diterbitkannya prangko bencana alam sebagai sarana penghimpunan bantuan bagi korban letusan, sekaligus sebagai bentuk respons simbolik negara terhadap krisis bencana.(Indonesia, 2025)



Gambar 4. Korban Merapi
(sumber: *www.anri.go.id*)

Representasi simbolik bencana tidak hanya hadir melalui media cetak dan prangko amal, tetapi juga diwujudkan dalam ekspresi seni rupa. Salah satu contoh penting adalah lukisan *Korban Merapi* karya Sadjiroen, seorang seniman dari Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta. Lukisan teknik *drypoint* yang dibuat pada 1 Desember 1955 ini menggambarkan penderitaan korban erupsi Gunung Merapi secara intim dan manusiawi, dengan menampilkan sosok lanjut usia dan seorang anak sebagai simbol kerentanan sosial akibat bencana. Sebagai lembaga pendidikan seni rupa yang didirikan di Yogyakarta dan kemudian berkembang menjadi bagian dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, ASRI memainkan peran penting dalam membentuk seniman-seniman yang peka terhadap isu sosial dan kemanusiaan. Keberadaan karya Sadjiroen, yang kini tersimpan dalam koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, menunjukkan bahwa bencana Merapi tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga direkam dan dimaknai melalui medium kultural. Dalam konteks *disaster relief*, lukisan ini berfungsi sebagai bentuk kesaksian visual sekaligus sarana pembentukan empati publik, yang melengkapi respons material negara dengan dimensi simbolik dan kultural dalam menghadapi krisis bencana.(Sadjiroen, 1955)

Peristiwa letusan Gunung Merapi tahun 1954 menunjukkan bahwa penanganan bencana pada masa awal kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui evakuasi dan bantuan darurat, tetapi juga melalui upaya penggalangan bantuan dan penyampaian empati kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, praktik *disaster relief* pada peristiwa ini mencakup bantuan nyata sekaligus dukungan sosial dan kultural bagi para korban bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik *disaster relief* pada bencana banjir di Surakarta (1951–1953) dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta (1954) berjalan secara nyata, tetapi bersifat terbatas dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Bantuan negara hadir terutama dalam bentuk evakuasi, bantuan darurat, dan pembangunan infrastruktur. Upaya-upaya ini relatif efektif dalam meredakan

dampak paling mendesak dari bencana, seperti penyelamatan korban dan pemulihan awal aktivitas sosial.

Tulisan ini menunjukkan bahwa *disaster relief* pada periode awal pascakemerdekaan bersifat reaktif, jangka pendek, dan belum mampu menjawab akar kerentanan sosial yang telah ada sebelum bencana terjadi. Dalam kasus banjir Surakarta, pembangunan infrastruktur dan bantuan pascabencana tidak diiringi dengan penanganan serius terhadap kerusakan lingkungan hulu dan ketimpangan tata ruang, sehingga banjir terus berulang dan terutama menimpa masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dalam letusan Gunung Merapi 1954, meskipun terdapat pemantauan vulkanik dan evakuasi, masyarakat lereng gunung tetap menanggung dampak paling berat, dengan proses pemulihan yang sangat bergantung pada jaringan sosial lokal.

Dengan demikian, praktik *disaster relief* pada periode ini berjalan secara terorganisasi, tetapi efektivitasnya bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan struktural yang membentuk kerentanan sosial. Efektivitas bantuan lebih terasa pada level kemanusiaan dan simbolik, melalui solidaritas, gotong royong, dan pembentukan empati public, daripada sebagai instrumen perlindungan sosial jangka panjang. Melalui pendekatan sosiologis dan teori kerentanan sosial, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana pada masa awal kemerdekaan lebih ditentukan oleh kapasitas sosial masyarakat dibandingkan oleh kapasitas institusional negara. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bencana merupakan bagian dari dinamika sejarah sosial Indonesia, di mana ketimpangan struktural dan keterbatasan negara membentuk pola respons dan pemulihan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

A.W. Coburn, et al. (1994). *Disaster Mitigation* (2nd ed., Issue January 1994). UNDP.

Anonim. (1954a). Suara Rakjat. *19 Januari*.

Anonim. (1954b). Suara Rakjat. *20 Januari*.

Bobbette, A. (2023). *The Pulse of the Earth: Political Geology in Java*. Duke University Press.

BPBD. (2022). *Potensi Ancaman Bencana Gunung Merapi*. 30 Agustus. https://bpbd.boyolali.go.id/383-potensi-ancaman-bencana/673-potensi-ancaman-bencana-gunung-merapi

Chatarina Muryani et al. (2024). Disaster risk analysis of Merapi Volcano eruption in the north slope based on the New Volcanic Risk Ranking (VRR) methods Disaster risk analysis of Merapi Volcano eruption in the north slope based on the New Volcanic Risk Ranking (VRR) methods. *IOP Confrence Series: Earth and Environmental Scince*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1314/1/012015

Courant, N. (1951). Overstroming in Het Solose. *25 Januari*.

Diaz, M., Kholik, N., Putri, D. A., Suci, M., Putri, A., Farezy, B. A., Faqih, M., Novalinda, B., & Gilang, Z. (2025). Dampak Sosial dari Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 pada Masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Mediasi*, *4*(2), 457–468.

Firdaus, H. (2020). *Lava Sisa Erupsi Tahun 1954 Runtuh, Status Merapi Masih Siaga*. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/lava-sisa-erupsi-tahun-1954-runtuh-status-merapi-masih-siaga

Handelsblad, A. (1953). Ontbossing op Java oorzaak der overstromingen. *16 Feb*.

Harnako, R. G. dan D. (1993). *Sejarah Sosial Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*. CV. Manggala Bhakti.

Imam Subekti, et al. (2021). *Mengenal Vulkanologi (Ilmu tentang Gunung Api)*. Institut Teknologi PLN.

Indonesia, P. (2025). *Prangko Amal*. PT Pos Indonesia (Persero). https://www.posindonesia.co.id/id/pages/prangko-amal

Indrajaya, D. W. (2021). *Sejarah Hari Ini (19 Februari 1954) - Sukarno Tinjau Pos Penjagaan Gunung Merapi*. Good News from Indonesia. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/02/19/sejarah-hari-ini-19-februari-1954-sukarno-tinjau-pos-penjagaan-gunung-merapi

Kholidah, N. I. F. (2022). "Banjir dan Bantuan di Surakarta" Filantropi dalam Banjir Solo Tahun 1966. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, *3*(30).

Kompas, H. (2020). *Video Guguran Lava Sisa Erupsi Merapi Tahun 1954*. 22 November. https://www.youtube.com/watch?v=s4_utOhZDws&t=11s

Locomotief, D. (1953a). Aanvulling Prov.-begroting. *21 Mei*.

Locomotief, D. (1953b). Orientatie-tocht boven de Merapi. *9 Maret*, *2*.

Mawarni, N. L. (2019). *Hancur Akibat Letusan Dahsyat Merapi 1954, Ini Yang Tersisa di Pencar Boyolali*. 19 November. https://solopos.espos.id/hancur-akibat-letusan-dahsyat-merapi-1954-ini-yang-tersisa-di-pencar-boyolali-1031885-1031885

Merapi, M. G. (2010). *Sejarah Letusan Merapi*. 5 Juni 2010. https://mgm.slemankab.go.id/tag/sejarah-letusan-merapi/

Mewangi, M. (2020). *Kisah Warga Dusun Pencar yang Terpencar akibat Erupsi Gunung Merapi*. 23 November. https://www.kompas.id/artikel/kisah-warga-dusun-pencar-yang-terpencar-akibat-erupsi-gunung-merapi

Nederland, I. C. voor. (1953). De Bandjirs in Indonesie Overstromingen in Solose waren te verwachten Minister van Landbouw over de oorzaker van de ramp. *25 Februari*, *February*.

Pathé, B. (1954). *MERAPI VOLCANO ERUPTS (1954)*. https://www.britishpathe.com/asset/197436/

Pathé, B. (2014). *Merapi Volcano Erupts (1954)*. 13 April. https://www.youtube.com/watch?v=ppHSxFYpTy0&t=13s

Sadjiroen. (1955). Korban Merapi. In *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)* (No. 28972).

Perda Kota Surakarta, Pub. L. No. 12 (2010).

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2014). *At Risk: Natural Hazards, Peoples Vulnerability and Disasters* (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203714775